



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Tahun

**2025
-
2029**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 ini dapat disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan. Renstra ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk mendukung visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada pendekatan partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi, serta kebutuhan daerah.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan tercipta sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kokoh untuk pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH



Sahtiar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya Aparatur	9
2.3 Kinerja Pelayanan	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	24
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	34
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
52	
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	53
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	55
BAB V	
PENUTUP.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	10
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	11
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	11
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Pendukung	114
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	116
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	118
Tabel 3. 1	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	24
Tabel 4. 1	
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	34
Tabel 5. 1	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
Tabel 6. 1	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah	39
Tabel 7. 1	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	40
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	0



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis atau yang biasa disebut sebagai (RENSTRA) merupakan sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang digunakan oleh Pemerintahan K/L untuk merencanakan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam periode 5 (lima) tahun. Tujuan dari Rencana Strategis adalah untuk menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, serta strategi dan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana Strategis sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pemerintahan K/L dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Tahapan atau proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, penyusunan Rancangan Akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar di bidang kelautan, perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya. Sebagai daerah kepulauan yang terletak di wilayah perbatasan negara, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran strategis dalam mendukung pertahanan, keamanan, serta pembangunan ekonomi nasional. Namun, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu hambatan dalam percepatan pembangunan daerah ini.

Seiring dengan perkembangan dinamika global, nasional, dan regional, pemerintah daerah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian dari upaya perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan sistematis. Renstra ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah dalam menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan strategis, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Selain itu, Renstra ini juga memperhatikan berbagai isu strategis yang dihadapi daerah, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.



Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, peran Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak administrasi pemerintahan sangatlah penting. Sekretariat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya koordinasi yang efektif antar perangkat daerah, serta mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, diperlukan perencanaan strategis yang mampu menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan operasional bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui Renstra ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemangku kepentingan dalam membangun daerah yang berdaya saing, maju, dan sejahtera. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024)



1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis Sekretariat Daerah yang sesuai dengan isu-isu strategis di bidang politik, kebangsaan, dan pengelolaan konflik.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).
4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai stabilitas politik, harmoni sosial, dan penguatan persatuan bangsa.



5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan rancangan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan. Permasalahan dan Isu Strategis berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Setda Kab. Kep. Anambas, telaah dan rumusan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Setda Kab. Kep. Anambas. strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.



BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretariat Daerah memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang jelas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Tupoksi Setda yang meliputi perencanaan, koordinasi, dan evaluasi menjadi jalur utama masuknya PUG:

1. **Perumusan dan Koordinasi Kebijakan (Peran PUG sebagai *Filter*):** Setda memiliki tugas sentral dalam **mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah**. Di sinilah peran PUG paling krusial. Setda wajib bertindak sebagai *filter* atau penyaring kebijakan. Setiap rancangan kebijakan yang masuk, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga produk hukum spesifik, harus melalui **Analisis Gender (AGA)**. Setda memastikan bahwa kebijakan tersebut **responsif gender**, artinya tidak ada satu pun kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, yang dirugikan atau terlewatkan dalam program pembangunan. Setda mengarahkan seluruh Asisten dan Bagian untuk menggunakan data terpilah gender dalam proses perumusan.

2. **Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah (Peran PUG sebagai Komando):** Sebagai koordinator seluruh PD (Dinas, Badan, dan Kantor), Setda bertanggung jawab memastikan PUG benar-benar dieksekusi di lapangan. Setda melalui Asisten yang membidangi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, harus secara tegas **menginstruksikan dan mengukur** sejauh mana PD mengalokasikan anggaran untuk kegiatan responsif gender (*Gender Budgeting*). Setda menjadi komandan yang memastikan Dinas Pendidikan membuat program yang mengurangi angka putus sekolah pada anak perempuan dan anak laki-laki dengan penyebab yang berbeda, atau Dinas Kesehatan menyediakan layanan yang aksesibel bagi semua gender.
3. **Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Kebijakan (Peran PUG sebagai Indikator Keberhasilan):** Fungsi Monev Setda berubah menjadi alat ukur keberhasilan PUG. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun Setda harus mencerminkan sejauh mana kesenjangan gender telah diturunkan. Setda **memantau dengan indikator terpilah gender**, misalnya: *Apakah tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbang meningkat? Apakah jumlah kepemilikan usaha mikro oleh perempuan telah terbantu oleh program dinas terkait?* Setda tidak hanya mengevaluasi output program, tetapi juga dampaknya terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur (Peran PUG sebagai Budaya Organisasi): Setda juga bertugas membina



Aparatur Sipil Negara (ASN). PUG harus diinternalisasikan sebagai budaya kerja. Ini mencakup:

Kepegawaian: Memastikan tidak ada diskriminasi dalam rekrutmen, promosi jabatan, dan pelatihan ASN;

Tata Laksana: Menyediakan fasilitas kerja yang ramah gender (misalnya ruang laktasi atau jam kerja fleksibel bagi yang membutuhkan);

Kapabilitas: Setda memimpin pelatihan PUG (Pendidikan dan Pelatihan PUG) bagi seluruh ASN, menjadikan setiap pegawai memiliki kesadaran gender.

Adapun tugas dan fungsi OPD Sekretariat Daerah dalam menjalankan fungsi roda pemerintahan ialah;

a. Tugas Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Pelayanan Administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi Daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah

Fungsi :

- Merumuskan dan Menetapkan kebijakan daerah;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan SETDA;
- Melakukan koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- Melakukan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan SETDA; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Tugas :

- Membantu Kepala Daerah (Bupati atau Wali Kota) dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, serta memberikan pelayanan administratif dan pembinaan



kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

2. Asisten I Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Hukum

Fungsi :

- Melakukan penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- Melakukan koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat;
- Melakukan Pemantauan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Melakukan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas :

- Membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan



daerah di bidang Pemerintahan, Hukum, dan
Pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah di
bidang Kesejahteraan Rakyat.

3. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan

- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Bagian Administrasi Pembangunan

Fungsi :

- Melakukan penyiapan administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
- Melakukan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama, dan otonomi daerah;
- Melakukan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang Pemerintahan dan Kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, kerja sama, dan otonomi daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Tugas :

- Membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan



daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Asisten III Administrasi Umum

- Bagian Umum
- Bagian Organisasi
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tugas :

- Melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan.
- Melakukan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum, organisasi, protokol komunikasi dan dokumentasi pimpinan.
- Melakukan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang umum, organisasi, protokol komunikasi dan dokumentasi pimpinan.
- Melakukan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang umum, organisasi, protokol komunikasi dan pimpinan; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang umum, organisasi, protokol komunikasi dan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

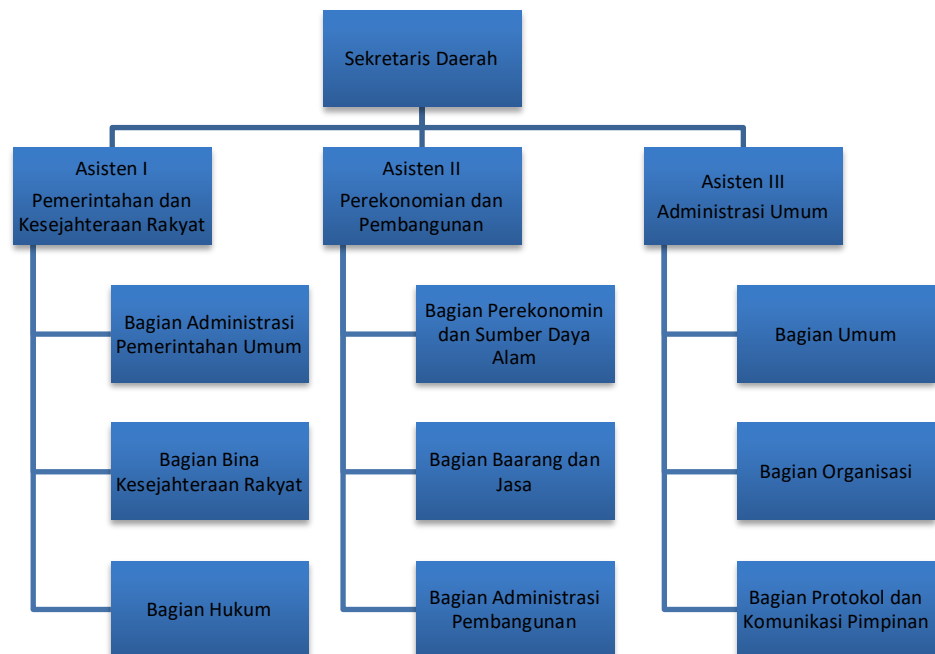
Fungsi :



- Membantu Sekda dalam menyusun kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol komunikasi dan pimpinan.

Lebih lanjut Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas



2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Per Januari 2025 berjumlah 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang terdiri dari 82 Aparatur Sipil Negara dan 216 Pegawai Tidak Tetap. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan



Adapun komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

No	Golongan	Jabatan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya Eselon II.a	Sekretaris Daerah	1 orang
2	Pembina Utama Muda Eselon II.b	Asisten	2 orang
3	Pembina Tk. I Eselon II.b	Asisten	1 orang
4	Pembina Utama Muda Eselon II.b	Staf Ahli	2 orang
5	Pembina Tk. I Eselon III.a	Kepala Bagian	1 orang
6	Pembina Eselon III.a	Kepala Bagian	6 orang
7	Pembina Eselon III.a	Plt. Kepala Bagian	1 orang
8	Penata Tk. I Eselon III.a	Kepala Bagian	1 orang
9	Penata Tk. I	Fungsional	8 orang
10	Penata	Fungsional	6 orang
11	Penata Eselon IV.a	Kasubbag Protokol	1 orang
12	Penata Tk. I	Pelaksana	1 orang
13	Penata Muda Tk. I	Fungsional	2 orang
14	Penata Muda Tk. I	Pelaksana	5 orang
15	Penata Muda	Fungsional	13 orang
16	Penata Muda	Pelaksana	19 orang
17	Pengatur Tk. I	Pelaksana	5 orang
18	Pengatur	Pelaksana	1 orang
19	PPPK	Fungsional	180 orang
Jumlah			256 orang

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Sekretariat Daerah di dominasi oleh tenaga honorer PPPK yang berjumlah 180 orang sedangkan ASN berjumlah 82 Orang yang terdiri dari jabatan eselon II.a berjumlah 1 orang, eselon II.b berjumlah 5 orang, eselon III.a berjumlah 9 orang, eselon IV.a berjumlah 1 orang dan staf berjumlah 65 orang.



b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Sekretariat Daerah tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	ASN : 82 Orang	S2 : 7 Orang
		S1 : 106 Orang
		D3 : 15 Orang
		SMA/SMK : 116 Orang
		SD : 12 Orang
Jumlah		256 Orang

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Sekretariat Daerah didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2. 3

Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	123	133
Jumlah	123	133

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Sekretariat Daerah. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang



agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja sesuai dengan formasi dan kebutuhan organisasi. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan



prasarana, Sekretariat Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	2 Unit	2016
3	PC	6 Unit	2017
4	Laptop	9 Unit	2017
5	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	1 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor (matic)	1 Unit	2020

2.3 Kinerja Pelayanan



Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama ini telah berperan penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitasi administrasi, koordinasi antar perangkat daerah, serta penyusunan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi pemerintahan. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat alur kerja dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik.

Meski telah menunjukkan capaian yang signifikan, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemerataan layanan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan adanya Renstra 2025-2029, diharapkan Sekretariat Daerah dapat terus memperbaiki kinerja pelayanan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul, responsif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

[illegible]

[illegible]



Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretariat Daerah telah menetapkan berbagai indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Indikator-indikator tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui target-target yang terukur.

Kinerja di bidang keagamaan menunjukkan peningkatan progresif. Pada indikator cakupan kegiatan keagamaan yang berkualitas, targetnya meningkat dari 70% pada tahun 2021 menjadi 87% pada tahun 2026. Demikian pula, persentase pembinaan dan pelayanan umat beragama direncanakan terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2026, yang mencerminkan perhatian besar terhadap kehidupan beragama masyarakat. Selain itu, dalam hal pengendalian perekonomian dan pembangunan, persentase kebijakan yang diterbitkan meningkat signifikan, dari 17% pada tahun 2021 hingga target 100% pada tahun 2026, mencerminkan upaya penguatan tata kelola pembangunan daerah.

Dari sisi reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah menargetkan perbaikan indeks reformasi birokrasi dari kategori "B" (60,1) pada tahun 2021 menjadi "BB" (75) pada tahun 2026. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga direncanakan meningkat dari "B" (60,01) menjadi "BB" (73,45) dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) ditargetkan naik dari kategori "Tinggi" (3,60) pada tahun 2021 menjadi "Sangat Tinggi" (4,25) pada tahun 2026, menunjukkan peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.



Pada aspek kepuasan masyarakat, indeks kepuasan masyarakat (IKM) diharapkan meningkat secara konsisten dari 82 pada tahun 2021 ke 89,87 pada tahun 2026. Selain itu, indikator lain seperti persentase pengadaan barang dan jasa yang terealisasi, pelaporan progres fisik OPD tepat waktu, dan pelayanan kepada pimpinan ditargetkan tetap berada pada tingkat 100% sepanjang periode perencanaan.

Dalam sektor infrastruktur dan energi, upaya peningkatan akses listrik menunjukkan hasil yang signifikan. Rasio ketersediaan daya listrik ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2024, dan persentase rumah tangga pengguna listrik meningkat dari 80,28% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar energi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menggambarkan fokus strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan pencapaian target-target ini, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		40.0 30.71 6.661	41.7 64.30 3.478	40.92 7.786 .535	34.96 6.168 .775	29.4 53.27 3.985				32.58 1.149 .346										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.56 7.066 .639	20.32 2.490 .801	20.53 6.571 .789	23.94 1.997 .692	18.85 3.536 .434				17.20 5.193 .425										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		379.8 90.20 0	113.0 80.00 0	54.36 6.200	70.33 1.140	50.33 1.140				45.47 8.360										
Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.931 .082. 880	5.132 .993. 956	6.219 .146. 211	3.436 .842. 125	3.566 .956. 310				4.385 .905. 645										
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.484 .856. 510	216.1 71.30 0	734.0 23.60 3	563.7 35.63 8	174.7 88.34 4				277.8 99.71 2										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.554 .129. 848	1.255 .294. 799	1.190 .845. 408	1.871 .750. 318	1.583 .133. 988				841.9 36.45 1										
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.275 .336. 215	957.8 69.62 6	664.9 28.59 0	636.9 32.03 0	638.9 43.87 0				356.5 17.95 5										
Penataan Organisasi		487.0 55.70 0	458.5 71.37 6	670.0 86.75 0	484.5 26.58 7	501.2 68.98 8				472.6 66.31 8										

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1.130 .375. 680	1.050 .942. 600	1.096 .623. 493	1.243 .558. 373	1.240 .348. 493				625.9 29.64 1										
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		12.02 3.888 .300	12.27 9.427 .027	8.712 .256. 676	6.832 .003. 389	6.821 .058. 782				7.182 .231. 812										
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		10.91 0.250 .100	11.03 2.056 .682	6.812 .653. 376	5.760 .546. 773	5.763 .872. 817				5.850 .817. 644										
Program Perekonomian dan Pembangunan		1.823 .854. 940	2.905 .849. 896	2.040 .639. 573	1.928 .662. 283	1.817 .928. 381				1.622 .197. 747										
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		315.3 06.50 0	345.2 08.05 0	310.8 53.11 0	158.6 11.52 7	150.8 27.63 5				144.4 76.80 0										
Administrasi Tata Pemerintahan		403.3 13.20 0	503.1 26.60 0	497.9 46.50 0	154.2 67.34 4	158.9 81.72 1				224.7 39.54 5										
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		710.3 25.00 0	744.2 43.74 5	1.401 .656. 400	917.1 89.27 2	989.2 61.64 7				1.106 .680. 623										
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		314.5 56.10 0	702.5 83.94 0	695.7 15.90 0	477.0 98.68 0	452.7 81.87 1				651.8 09.96 0										
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		959.5 24.94 0	1.608 .086. 256	888.3 20.56 3	1.243 .314. 076	819.8 37.19 2				713.6 38.98 7										



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah agar mampu menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.
2. Infrastruktur pendukung kerja, seperti fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelayanan.
3. Sinergi antarbagian dalam Sekretariat Daerah masih memerlukan penguatan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terintegrasi.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Sebagai wilayah kepulauan, aksesibilitas antarwilayah menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan dan koordinasi antar perangkat daerah.
2. Perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis memerlukan respons cepat dan adaptasi kebijakan yang relevan.



3. Kabupaten Kepulauan Anambas perlu bersaing dengan daerah lain dalam menarik investasi dan memperkuat daya saing ekonomi lokal.

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Kekayaan laut, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mendanai peningkatan pelayanan publik.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang untuk memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Adanya peluang kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas pelayanan dan pembangunan daerah.
4. Kebijakan pembangunan nasional dan program-program pemerintah pusat memberikan peluang pembiayaan dan pendampingan teknis dalam pengembangan pelayanan.

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi



Dalam menjalankan perannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan. Permasalahan yang dihadapi mencakup aspek kebijakan, koordinasi, administrasi, layanan teknis, dan fasilitasi hubungan kerja, yang masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Melalui identifikasi ini, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

a. Penyusunan Kebijakan Daerah

Dalam konteks penyusunan kebijakan, permasalahan utama yang sering muncul adalah kurangnya data dan informasi yang valid serta relevan. Data yang ada seringkali tidak mencerminkan kondisi riil, sehingga menyulitkan proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dalam tahap perumusan kebijakan kerap tidak optimal, yang berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sinkron dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

b. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah. Namun, salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya kesenjangan pemahaman mengenai prioritas pembangunan, baik di tingkat internal maupun lintas sektor. Ketiadaan mekanisme evaluasi yang terintegrasi juga menjadi hambatan dalam memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.



c. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Daerah

Dalam hal pembinaan administrasi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan utama. Pegawai yang terlibat dalam sistem administrasi sering kali kurang menguasai penggunaan teknologi informasi, yang saat ini sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan administrasi. Selain itu, infrastruktur pendukung, seperti perangkat lunak administrasi dan jaringan internet, belum sepenuhnya memadai, terutama di wilayah yang memiliki akses terbatas.

d. Penyediaan Layanan Teknis Administratif

Pelayanan teknis administratif yang menjadi salah satu fungsi penting Sekretariat Daerah juga menghadapi tantangan, seperti prosedur kerja yang masih bersifat manual. Hal ini tidak hanya menghambat kecepatan layanan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administrasi. Kurangnya standardisasi dalam proses pelayanan teknis juga menjadi faktor yang memengaruhi konsistensi dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada perangkat daerah lainnya.

e. Fasilitasi Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Lembaga Vertikal

Hubungan kerja antara perangkat daerah dengan lembaga vertikal sering kali menghadapi hambatan komunikasi. Kurangnya forum komunikasi dan koordinasi yang rutin menjadi salah satu penyebab rendahnya sinkronisasi program dan kebijakan. Selain itu, mekanisme kerja yang belum sepenuhnya terintegrasi membuat potensi sinergi antara perangkat daerah dan lembaga vertikal tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.



Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

Tabel. 3.1 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

N o	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Kebijakan Daerah	Kebijakan kurang berbasis data	Data yang tersedia tidak valid, tidak terkini, dan tidak terintegrasi antar sektor
		Sinkronisasi kebijakan antar perangkat daerah belum optimal	Kurangnya koordinasi dan forum komunikasi yang efektif antar perangkat daerah
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan rencana pembangunan	Mekanisme evaluasi pelaksanaan program belum terintegrasi
		Rendahnya sinergi antar perangkat daerah	Tidak ada alat bantu atau sistem terpadu yang mendukung sinergi antar perangkat daerah
3	Kinerja Administrasi Pemerintahan	Proses administrasi masih lambat	Penerapan teknologi informasi belum maksimal dalam sistem administrasi
		Banyaknya kesalahan administratif	Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan administrasi berbasis teknologi
4	Kualitas Pelayanan Teknis Administratif	Proses pelayanan belum terstandarisasi	Tidak ada pedoman atau SOP yang jelas untuk seluruh proses pelayanan
		Prosedur kerja masih manual	Infrastruktur pendukung, seperti perangkat teknologi dan jaringan, belum memadai
5	Hubungan Kerja dengan Lembaga Vertikal	Koordinasi antar lembaga tidak berjalan efektif	Kurangnya forum komunikasi rutin antara perangkat daerah dan lembaga vertikal
		Kebijakan antar sektor tidak sinkron	Tidak adanya panduan kerja lintas sektor yang jelas
6	Pemerataan Infrastruktur dan Pelayanan	Layanan publik belum merata di seluruh wilayah	Keterbatasan aksesibilitas akibat kondisi geografis yang terdiri dari wilayah kepulauan



N o	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Infrastruktur dasar, seperti jaringan internet, belum memadai	Investasi pada infrastruktur pendukung tidak merata di seluruh wilayah
7	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	Kurangnya sosialisasi dan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan
		Tingginya ekspektasi masyarakat tanpa pemahaman yang memadai	Edukasi masyarakat tentang mekanisme pembangunan daerah masih terbatas

Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi priode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan
3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi



4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terdapat pada seluruh misi yakni Misi 1, Misi 2, Misi 3, Misi 4 dan Misi 5.

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Sekretariat Daerah yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.* Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.



3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Sekretariat Daerah melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di



Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pasal 6 bertujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi :

1. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan;
2. Keterbatasan luas lahan kawasan budidaya, yaitu 93 % dari total luas Kepulauan Anambas merupakan wilayah kelautan dan pulau- pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar;
4. Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 20 tahun mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana



rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Selanjutnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 5 tahun ke depan dilakukan dengan memperhatikan tantangan yang ada, peluang pembangunan, serta analisis terhadap tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Isu strategis ini diidentifikasi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan utama, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Berikut penjabaran isu-isu strategis berdasarkan prioritas pembangunan daerah:

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Kualitas tata kelola pemerintahan menentukan



keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan seperti koordinasi yang belum optimal, keterbatasan SDM yang kompeten, serta perlunya pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi perhatian utama.

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Pemerataan Infrastruktur Dasar

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tantangan besar dalam aksesibilitas dan distribusi infrastruktur dasar. Ketimpangan antarwilayah masih menjadi isu utama yang menghambat pemerataan pelayanan. Perlu adanya investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.

3. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal akibat rendahnya pengelolaan, minimnya infrastruktur pendukung, dan keterbatasan akses pasar. Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dapat menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat mengancam kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya laut, Anambas harus memastikan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya sekaligus mencegah kerusakan lingkungan.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang



cepat, transparan, dan berkualitas terus meningkat. Untuk itu, diperlukan reformasi layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelayanan administratif dan publik.

6. Penguatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan

Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas dalam periode 2025–2029. Tujuan memberikan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan langkah konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sasaran disusun secara spesifik, terukur, dan realistis agar dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tujuan dan sasaran ini dirumuskan berdasarkan analisis isu strategis, tantangan, serta peluang yang dihadapi daerah. Dengan pendekatan yang terukur dan sistematis, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara sinergis. Penetapan indikator tujuan dan sasaran dilengkapi dengan target capaian tahunan agar kemajuan pembangunan dapat dievaluasi dan disesuaikan sesuai kondisi di lapangan.

Berikut ini adalah tabel yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, beserta indikator kinerja dan target yang telah disusun untuk lima tahun mendatang, yakni dari 2025 hingga 2029.

Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Permendagri No 104 tahun 2016	T1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2900 (Sedang)	3000 (Sedang)	3200 (Sedang)	3300 (Tinggi)	3350 (Tinggi)	3400 (Tinggi)	
			Nilai AKIP	63	68	73	78	83	85	
			Nilai Indeks Pelayanan Publik	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	
		S.1.1 Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	40	65	67	69	70	72	
			Indeks Reformasi Hukum	98,2	98,5	98,7	98,9	99	99,2	
		S.1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	82	85	87	90	92	

		barang / jasa pemerintah								
		S.1.3 Meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi	35	38	40	43	47	50	
		S.1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kualitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	76	78	81	83	87	89	



3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan elemen penting dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman operasional, strategi memberikan arah yang jelas untuk mencapai tujuan melalui langkah-langkah terencana dan sistematis. Di sisi lain, kebijakan menjadi landasan normatif yang memastikan setiap langkah strategis sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Melalui sinergi antara strategi dan kebijakan, pemerintah daerah dapat menghadirkan solusi yang relevan terhadap tantangan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Penyusunan strategi dan kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan capaian jangka pendek, tetapi juga mencerminkan visi jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam konteks peningkatan tata kelola pemerintahan, strategi yang dirancang berfokus pada optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, untuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan diarahkan pada pengembangan program berbasis kebutuhan lokal dan penguatan sinergi antar-pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang holistik dan integratif, strategi dan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan perubahan positif yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Berikut adalah rincian penjabaran dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:



Tabel. 3.1 (Tab T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah			
Misi	: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur 2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan 3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi 4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	1. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	1. Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	1. Mendorong peningkatan kualitas evaluasi kinerja berbasis SAKIP.
		2. Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang / jasa pemerintah	2. Optimalisasi pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD.	2. Penyusunan kebijakan berbasis hasil untuk mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.
		3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Pengembangan kapasitas SDM dalam tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.	3. Penyediaan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk peningkatan profesionalisme ASN.
		4. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4. Peningkatan layanan publik melalui inovasi dan teknologi informasi.	4. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung transparansi dan efisiensi layanan kepada masyarakat.
			5. Penyelarasan produk hukum dengan peraturan yang lebih tinggi.	5. Peningkatan kualitas proses harmonisasi regulasi melalui sinergi antar-lembaga terkait.
			6. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan produk hukum.	6. Pelaksanaan konsultasi publik untuk memastikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Visi	: Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah			
Misi	: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur 2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan 3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi 4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan.			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Tabel ini merinci strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan setiap tahun, dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, harmonisasi produk hukum, dan peningkatan layanan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini dirancang untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.



BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, pemerintah daerah perlu merancang berbagai program strategis yang dapat menunjang tercapainya visi dan misi daerah. Program-program tersebut harus selaras dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, kesejahteraan rakyat, serta perekonomian dan pembangunan. Dengan adanya perencanaan yang baik, program-program ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat dan memperkuat posisi daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi global.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi langkah awal yang sangat penting. Setiap program yang dirancang harus disertai dengan kegiatan yang terukur, realistis, dan dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu tertentu. Penentuan prioritas program perlu disesuaikan dengan kondisi daerah yang meliputi tantangan, potensi, serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, kegiatan yang ditawarkan dalam setiap program perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan, efektivitas, serta dampak jangka panjang yang dapat tercipta.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota



Program ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar-unit pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan dan program yang menyentuh langsung pada sektor-sektor sosial dan kesejahteraan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di daerah, dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal. Serta diharapkan dapat tercipta stabilitas ekonomi daerah yang mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global dan tantangan internal.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 6.1 (Tabel T-C.27.)

Tabel. 6.1 (Tabel T-C. 27.)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROG 1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	70%	70%	450.000.000	75%	472.500.000	80%	496.125.000	85%	520.931.250	90%	546.977.813	
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3200 (Sedang)	3000 (Sedang)	450.000.000	3200 (Sedang)	472.500.000	3200 (Sedang)	496.125.000	3350 (Tinggi)	520.931.250	3400 (Tinggi)	546.977.813	
KEG 1.1 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	100%	450.000.000	100%	472.500.000	100%	496.125.000	100%	520.931.250	100%	546.977.813	
SUB KEG 1.1.1 Penataan Administra si Pemerintah an	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	4 Dokume n	250.000.000	4 Dokume n	262.500.000	4 Dokume n	275.625.000	4 Dokume n	289.406.250	4 Dokume n	303.876.563	
SUB KEG 1.1.2 Fasilitasi Pelaksanaa n Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 Dokumen	12 Dokume n	200.000.000	12 Dokume n	210.000.000	12 Dokume n	220.500.000	12 Dokume n	231.525.000	12 Dokume n	243.101.250	
PROG.2 Program Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	9.535.864.320	100%	10.012.657.536	100%	10.513.290.413	100%	11.038.954.933	100%	11.590.902.680	
KEG 2.1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masvarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	9.535.864.320	100%	10.012.657.536	100%	10.513.290.413	100%	11.038.954.933	100%	11.590.902.680	

SUB KEG 2.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	10 Dokumen	4.035.864.320	10 Dokumen	4.237.657.536	10 Dokumen	4.449.540.413	10 Dokumen	4.672.017.433	10 Dokumen	4.905.618.305	
SUB KEG 2.1.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20 Dokumen	20 Dokumen	5.500.000.000	20 Dokumen	5.775.000.000	20 Dokumen	6.063.750.000	20 Dokumen	6.366.937.500	20 Dokumen	6.685.284.375	
PROG.3 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	100%	100%	1.600.000.000	100%	1.620.000.000	100%	1.640.000.000	100%	1.660.000.000	100%	1.680.000.000	
KEG.3.1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	100%	100%	1.600.000.000	100%	1.620.000.000	100%	1.640.000.000	100%	1.660.000.000	100%	1.680.000.000	
SUB KEG. 3.1.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	65 Dokumen	65 Dokumen	750.000.000	66 Dokumen	760.000.000	67 Dokumen	770.000.000	68 Dokumen	780.000.000	69 Dokumen	790.000.000	
SUB KEG. 3.1.2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 kasus	1 kasus	500.000.000	1 kasus	505.000.000	1 kasus	510.000.000	1 kasus	515.000.000	1 kasus	520.000.000	
SUB KEG. 3.1.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Didokumentasi	65 Dokumen	65 Dokumen	350.000.000	66 Dokumen	355.000.000	67 Dokumen	360.000.000	68 Dokumen	365.000.000	69 Dokumen	370.000.000	

n Informasi Hukum													
PROG.4 Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	83%	84%	800.000.000	85%	900.000.000	86%	510.000.000	87%	540.000.000	88%	570.000.000	
KEG 4.1 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	83%	84%	450.000.000	85%	480.000.000	86%	510.000.000	87%	540.000.000	88%	570.000.000	
SUB KEG 4.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	160.000.000	4 Dokumen	170.000.000	4 Dokumen	180.000.000	4 Dokumen	190.000.000	
SUB KEG 4.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	160.000.000	4 Dokumen	170.000.000	4 Dokumen	180.000.000	4 Dokumen	190.000.000	

SUB KEG 4.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	160.000.000	4 Dokumen	170.000.000	4 Dokumen	180.000.000	4 Dokumen	190.000.000	
KEG 4.2 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	83%	84%	350.000.000	85%	420.000.000	86%	100%	87%	463.050.000	88%	486.202.500	
SUB KEG 4.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	210.000.000	12 Dokumen	220.500.000	12 Dokumen	231.525.000	
SUB KEG 4.2.2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	220.000.000	4 Laporan	231.000.000	4 Laporan	242.550.000	4 Laporan	254.677.500	
PROG.5 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	100%	516.520.680	100%	543.379.755	100%	571.635.503	100%	601.360.549	100%	632.631.297	
KEG. 5.1 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	516.520.680	100%	543.379.755	100%	571.635.503	100%	601.360.549	100%	632.631.297	
SUB KEG 5.1.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	#REF!	1 Dokumen	1 Dokumen	32.085.000	1 Dokumen	33.753.420	1 Dokumen	35.508.598	1 Dokumen	37.355.045	1 Dokumen	39.297.507	

SUB KEG 5.1.2 Pengendali an dan Evaluasi Program Pembangu nan	#REF!	2 Laporan	2 Laporan	395.995.980	2 Laporan	416.587.771	2 Laporan	438.250.335	2 Laporan	461.039.352	2 Laporan	485.013.399	
SUB KEG. 5.1.3 Pengelolaa n Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaa n Pembangu nan	#REF!	4 Laporan	4 Laporan	88.439.700	4 Laporan	93.038.564	4 Laporan	97.876.570	4 Laporan	102.966.151	4 Laporan	108.320.391	
PROG.6 Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	9/9	9/9	1.630.862.00 0	9/9	1.710.000.00 0	9/9	1.810.000.00 0	9/9	1.940.000.00 0	9/9	2.235.000.00 0	
KEG. 6.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	79,77%	82%	1.630.862.00 0	85%	1.710.000.00 0	87%	1.810.000.00 0	90%	1.940.000.00 0	92%	2.235.000.00 0	
SUB KEG 6.1.1 Pengelolaa n Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokume n	232.877.000	1 Dokume n	425.000.000	1 Dokume n	490.000.000	1 Dokume n	520.000.000	1 Dokume n	630.000.000	
SUB KEG 6.1.2 Pengelolaa n Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokume n	1.150.000.00 0	1 Dokume n	485.000.000	1 Dokume n	430.000.000	1 Dokume n	485.000.000	1 Dokume n	570.000.000	
SUB KEG 6.1.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Advokasi	1 Laporan	1 Laporan	247.985.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	890.000.000	1 Laporan	935.000.000	1 Laporan	1.035.000.00 0	

PROG.7 Program Penataan Organisasi	Persentase Indeks Kematangan Organisasi dengan Predikat Tinggi	29,41%	52,94%	731.000.000	67,65%	767.550.000	82,35%	805.927.500	91,18%	846.223.875	100%	888.535.069	
KEG.7.1 Kegiatan Penataan Organisasi	Cakupan Perangkat Daerah yang dilayani penataannya	10	18	731.000.000	23	767.550.000	28	805.927.500	31	846.223.875	34	888.535.069	
SUB KEG7.1.1 Pengelola an Kelembaga an dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	252.000.000	2 Dokumen	264.600.000	2 Dokumen	277.830.000	2 Dokumen	291.721.500	2 Dokumen	306.307.575	
SUB KEG7.1.2 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	231.000.000	2 Laporan	242.550.000	2 Laporan	254.677.500	2 Laporan	267.411.375	2 Laporan	280.781.944	
SUB KEG7.1.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	248.000.000	2 Dokumen	260.400.000	2 Dokumen	273.420.000	2 Dokumen	287.091.000	2 Dokumen	301.445.550	
PROG.8 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Tangga dan Keprotokolan KDH dan WKDH serta Layanan Administrasi Umum	88%	89%	31.587.383.352	89,5%	32.170.427.248	90%	32.766.293.880	90,5%	33.663.897.983	91%	35.016.034.657	
KEG 8.1 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	88%	89%	630.000.000	89,5%	667.500.000	90%	700.875.000	90,5%	735.918.750	91%	772.714.688	

SUB KEG 8.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	200.000.000	2 Orang	205.000.000	2 Orang	215.250.000	2 Orang	226.012.500	2 Orang	237.313.125	
SUB KEG 8.1.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	130.000.000	15 Paket	135.000.000	15 Paket	141.750.000	15 Paket	148.837.500	15 Paket	156.279.375	
SUB KEG 8.1.3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	50.000.000	2 Orang	52.500.000	2 Orang	55.125.000	2 Orang	57.881.250	2 Orang	60.775.313	
SUB KEG 8.1.4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	250.000.000	2 Orang	275.000.000	2 Orang	288.750.000	2 Orang	303.187.500	2 Orang	318.346.875	
KEG 8.2 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	88%	89%	270.000.000	89,5%	283.500.000	90%	297.675.000	90,5%	312.558.750	91%	328.186.688	

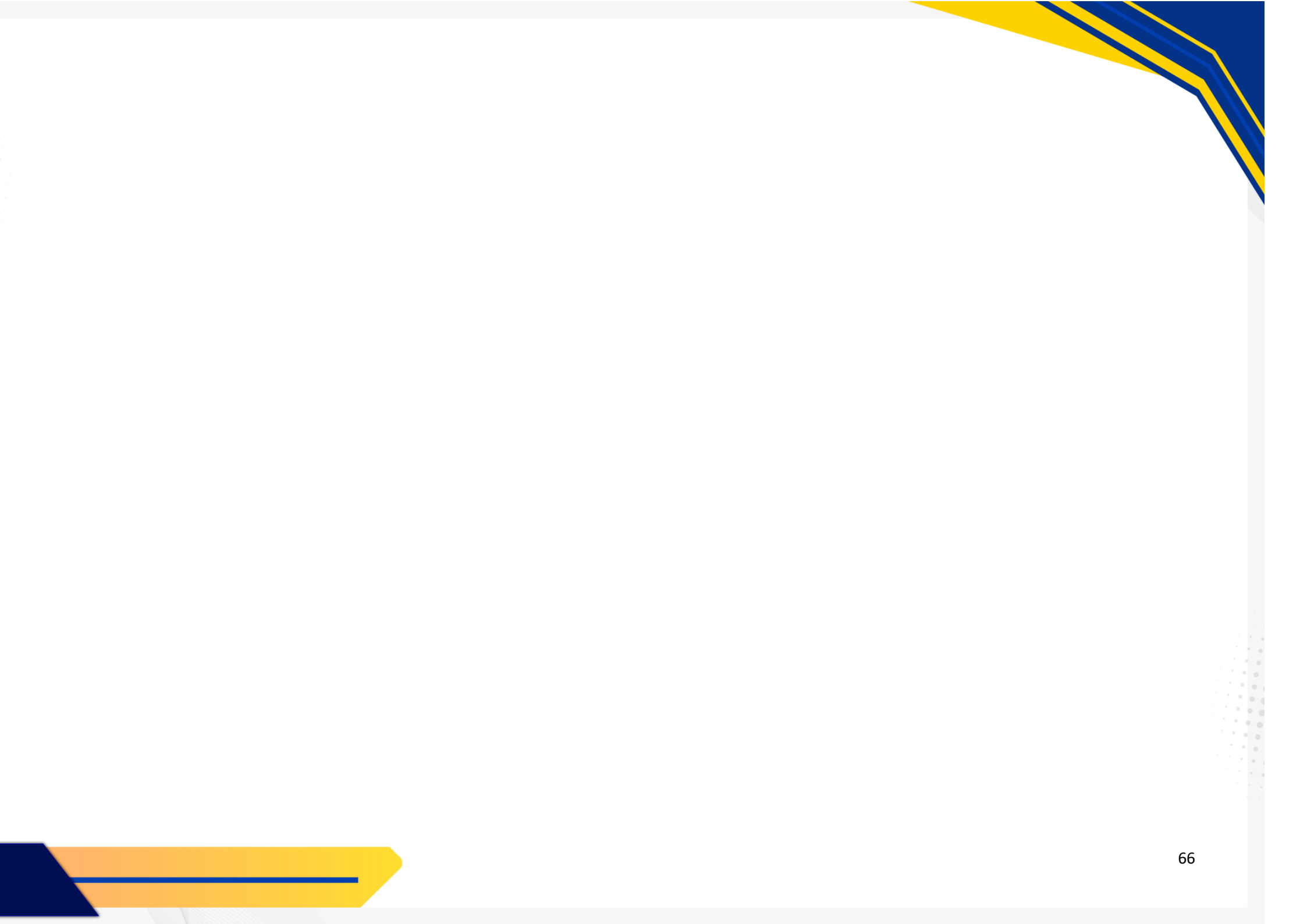
SUB KEG 8.2.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	100.000.000	30 Paket	105.000.000	30 Paket	110.250.000	30 Paket	115.762.500	30 Paket	121.550.625	
SUB KEG 8.2.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	90.000.000	30 Paket	94.500.000	30 Paket	99.225.000	30 Paket	104.186.250	30 Paket	109.395.563	
SUB KEG 8.2.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	80.000.000	50 Paket	84.000.000	50 Paket	88.200.000	50 Paket	92.610.000	50 Paket	97.240.500	
KEG 8.3 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat Kepuasan Layanan Keprotokoloan KDH dan WKDH	88%	89%	450.000.000	89,5%	472.500.000	90%	496.125.000	90,5%	520.931.250	91%	546.977.813	
SUB KEG 8.3.1 Fasilitasi Keprotokol an	Jumlah Dokumen / Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Dokumen	1 Dokume n	200.000.000	1 Dokume n	210.000.000	1 Dokume n	220.500.000	1 Dokume n	231.525.000	1 Dokume n	243.101.250	
SUB KEG 8.3.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	157.500.000	2 Laporan	165.375.000	2 Laporan	173.643.750	2 Laporan	182.325.938	
SUB KEG 8.3.3 Pendokume ntasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Dokumen	2 Dokume n	100.000.000	2 Dokume n	105.000.000	2 Dokume n	110.250.000	2 Dokume n	115.762.500	2 Dokume n	121.550.625	

KEG 8.4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88%	89%	27.781.971.2 84	89,5%	28.091.790.9 97	90%	28.406.308.9 07	90,5%	28.725.651.9 96	91%	29.049.952.5 16	
SUB KEG. 8.4.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang	275 Orang	26.981.971.2 84	275 Orang	27.251.790.9 97	275 Orang	27.524.308.9 07	275 Orang	27.799.551.9 96	275 Orang	28.077.547.5 16	
SUB KEG. 8.4.2 Pelaksanaa n Penatausah aan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	20 Dokume n	800.000.000	20 Dokume n	840.000.000	20 Dokume n	882.000.000	20 Dokume n	926.100.000	20 Dokume n	972.405.000	
KEG 8.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88%	89%	35.000.000	89,5%	36.750.000	90%	38.587.500	90,5%	40.516.875	91%	42.542.719	
SUB KEG. 8.5.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	50 Paket	35.000.000	50 Paket	36.750.000	50 Paket	38.587.500	50 Paket	40.516.875	50 Paket	42.542.719	
KEG. 8.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	88%	89%	4.366.250.00 0	89,5%	4.584.562.50 0	90%	4.813.790.62 5	90,5%	5.054.480.15 6	91%	5.307.204.16 4	
SUB KEG 8.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	85.000.000	50 Paket	89.250.000	50 Paket	93.712.500	50 Paket	98.398.125	50 Paket	103.318.031	

SUB KEG 8.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	82.250.000	30 Paket	86.362.500	30 Paket	90.680.625	30 Paket	95.214.656	30 Paket	99.975.389	
SUB KEG 8.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	99.000.000	50 Paket	103.950.000	50 Paket	109.147.500	50 Paket	114.604.875	50 Paket	120.335.119	
SUB KEG 8.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	1.000.000.00 0	50 Paket	1.050.000.00 0	50 Paket	1.102.500.00 0	50 Paket	1.157.625.00 0	50 Paket	1.215.506.25 0	
SUB KEG 8.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	100.000.000	50 Paket	105.000.000	50 Paket	110.250.000	50 Paket	115.762.500	50 Paket	121.550.625	
SUB KEG 8.6.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Paket	30 Paket	1.000.000.00 0	30 Paket	1.050.000.00 0	30 Paket	1.102.500.00 0	30 Paket	1.157.625.00 0	30 Paket	1.215.506.25 0	
SUB KEG 8.6.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	2.000.000.00 0	24 Laporan	2.100.000.00 0	24 Laporan	2.205.000.00 0	24 Laporan	2.315.250.00 0	24 Laporan	2.431.012.50 0	
KEG 8.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88%	89%	400.000.000	89,5%	420.000.000	90%	441.000.000	90,5%	463.050.000	91%	486.202.500	

SUB KEG 8.7.1 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	400.000.000	50 Unit	420.000.000	50 Unit	441.000.000	50 Unit	463.050.000	50 Unit	486.202.500	
KEG 8.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88%	89%	1.596.133.35 2	89,5%	1.675.940.02 0	90%	1.759.737.02 1	90,5%	1.847.723.87 2	91%	1.940.110.06 5	
SUB KEG 8.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	30 Laporan	100.000.000	30 Laporan	105.000.000	30 Laporan	110.250.000	30 Laporan	115.762.500	30 Laporan	121.550.625	
SUB KEG 8.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	30 Laporan	1.200.000.00 0	30 Laporan	1.260.000.00 0	30 Laporan	1.323.000.00 0	30 Laporan	1.389.150.00 0	30 Laporan	1.458.607.50 0	
SUB KEG 8.8.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	296.133.352	24 Laporan	310.940.020	24 Laporan	326.487.021	24 Laporan	342.811.372	24 Laporan	359.951.940	
KEG 8.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88%	89%	1.040.000.00 0	89,5%	1.092.000.00 0	90%	1.146.600.00 0	90,5%	1.203.930.00 0	91%	1.264.126.50 0	
SUB KEG 8.9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Kendaraan	30 Kendaraan	70.000.000	30 Kendaraan	73.500.000	30 Kendaraan	77.175.000	30 Kendaraan	81.033.750	30 Kendaraan	85.085.438	

Kendaraan Dinas Jabatan													
SUB KEG 8.9.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Peralatan dan Mesin	50 Peralatan dan Mesin	70.000.000	50 Peralatan dan Mesin	73.500.000	50 Peralatan dan Mesin	77.175.000	50 Peralatan dan Mesin	81.033.750	50 Peralatan dan Mesin	85.085.438	
SUB KEG 8.9.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.000.000	12 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	945.000.000	12 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	992.250.000	12 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.041.862.500	12 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.093.955.625	





Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap urusan pemerintahan, baik yang bersifat administratif, sosial, ekonomi, maupun pembangunan, dikelola secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan bidang urusan yang baik akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan atau sumber daya.

Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses implementasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan atau program yang berjalan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah. Penyelenggaraan urusan yang optimal juga akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, memperkuat kapasitas lembaga pemerintah, serta mempercepat proses perbaikan dalam hal infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan ekonomi.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:



Tabel. 7.1 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Permendagri No 104 tahun 2016	T1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pelayanan		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2900 (Sedang)	3000 (Sedang)	3200 (Sedang)	3300 (Tinggi)	3350 (Tinggi)	3400 (Tinggi)	
			Nilai AKIP	63	68	73	78	83	85	
			Nilai Indeks Pelayanan Publik	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	
		S.1.1 Meningkatkan kualitas kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	40	65	67	69	70	72	
			Indeks Reformasi Hukum	98,2	98,5	98,7	98,9	99	99,2	
		S.1.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang / jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80	82	85	87	90	92	
		S.1.3 Meningkatkan kualitas penataan perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi	35	38	40	43	47	50	
		S.1.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kualitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	76	78	81	83	87	89	



Tabel. 7.2 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	5	6	7	8	9	10	11
Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi	2900 (Sedang)	3000 (Sedang)	3200 (Sedang)	3300 (Tinggi)	3350 (Tinggi)	3400 (Tinggi)	
Indeks Berakhlak	63	68	73	78	83	85	
Indeks Kepuasan Masyarakat	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	
Return on Asset (ROA) BUMD	0	0	0,135	0,27	0,405	0,45	
Persentase Capaian Aksi HAM	63,3%	65	66	68	69	70	
Indeks Akses Keuangan Daerah	3,16	3,27	3,32	3,38	3,43	3,49	

Tabel ini mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



BAB V PENUTUP

Sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun dengan tujuan untuk memastikan tercapainya visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam perencanaannya, Renstra ini memfokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Rencana ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pihak terkait dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan yang ada dalam konteks geografis dan demografis Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan mengintegrasikan PUG ke dalam setiap alur kerja Tupoksinya, Sekretariat Daerah bertransformasi dari sekadar mesin birokrasi menjadi **arsitek pembangunan yang menjamin keadilan dan kesetaraan** bagi seluruh warga daerah. PUG adalah lensa yang digunakan Setda untuk melihat masalah dan potensi daerah secara utuh, sehingga fungsi pemerintahan yang dijalankan menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini memerlukan komitmen dan sinergi dari seluruh elemen pemerintahan daerah, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan harus dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan Renstra ini dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

baik, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah ini.

Tarempa, 15 September 2025

Sekretaris Daerah



Sahtiar